

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- IR. Hamid Shahab, 1996, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2017, *Konstruksi Dalam Angka*, BPS, Jakarta
- Suntana S. Djatnika, 2018, *Mitigasi Sengketa Hukum Dalam Kontrak kerja konstruksi*, Intitut Arbiter Indonesia, Jakarta
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum “Kajian Hukum Secara Sosiologis”*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2012, S.H, Dr. M. Ali Safa’at, S.H., M.H, “*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press*”, Konstitusi Press, Jakarta
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, 2017, “*Perihal Undang-Undang*”, Rajawali Pers, Depok.
- Lexy J. Moleong, 1993, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*”, Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- W. Friedman, 1993, “*Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhammad Arifin*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010 “*Konstitusi Ekonomi*”, Kompas, Jakarta.
- James K Feibleman, 1995, “*Justice, Law and Culture*”, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht Netherlands.
- Kusnardi dan Bitan R. Saragih, 2000, “*Ilmu Negara*”, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- CST Kansil dan Christine ST. Kansil, 1997, “*Hukum Tata Negara Republik Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta.

- W Fridemen, 1971, *"The State and The Rule of Law Mixed Economy"*, Steven & Son, London.
- Jimly Asshiddiqie, 1998, *"Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan"*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muchtar Kusumaatrnadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *"Theory Hans Kelsen Tentang Hukum"*, Cetakan 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1998, *"Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya"*, Kanisius, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum, cet.III*, Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Moh. Nazir, 1988, *"Metode Penelitian"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 1986, *"Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum"*, Rajawali, Jakarta.
- Sri Mamuji, et. al., 2005, *"Metode Penelitian dan Penulisan Hukum"*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *"Penelitian Hukum"*, Kencana, Jakarta.
- Johani Ibrahim, 2017, *"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif"*, cet. III, Bayumedia Publishing, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1986, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Depok.
- Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *"Penggunaan Metode Penelitian Menurut Tradisi Sains Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial"*, Elsam, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *"Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, S.H., MCL., MPA, 2019, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Edisi Revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Henry P. Panggabean, 2001, “*Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari. Upaya Penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi pengawasan Mahkamah Agung*”, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

H.R. Sri Soemantri M, 1997, “*Hak Uji Material Di Indonesia*”, Alumni, Bandung.

Roger Douglas, 2002, “*Administrative Law*”, the Federation Press, Sydney.

### Artikel Jurnal:

Nurcaweda Riztria Adinda, Program Studi Teknik Sipil STT Mandala, Dewan Sengketa Untuk Menghindari Terjadinya Sengketa Pada Proyek Konstruksi, *Isu Teknologi STT Mandala* Vol.6 No.1 Desember 2013.

Hadi Ismanto dan Sarwono Hardjomuljadi, Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan Fidic Condition Contract 2019, *Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa (Hadi – Sarwono)*.

I Made Wisnu Suyoga dan Yohanes Usfunan, Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Ajudiksi Dan Perbandingan Dengan Arbitrase, *Acta Comitatus Jurnaal Hukum Kenotariatan* Vol.5 No.2 Agustus Tahun 2020.

Ni'matul Huda, 2006, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum* Vol. 13 No. 1, Januari

M. Hisyam, J.J.J.M Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203. Dikutip dari *Jurnal Hukum Universitas Sumatra Utara*.

Peter Mahmud Marzuki, “The Need for the Indonesian Economic Legal Framework”, Dimuat dalam *Jurnal Hukum Ekonomi*, (Edisi IX, Agustus, 1997).

Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari, 2019, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, *UIR Law Review* Volume 03, Nomor 02, Yogyakarta.

Sandi Andika Surya Putra<sup>1</sup> dan Sarwono Hardjomuljadi, Program Studi Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara dan Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Pemenuhan Kewajiban Pengguna Jasa Sesuai Kontrak, *Jurnal Konstruksi*, Volume 12 Nomer 2, Juli 2021.

Aan Efendi, 2019, Problematik Penataan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, *Verita et Justitia*, Volume 5, Nomor 1, Juni DOI: 10.25123/vej.3172.

Sukardi dan E. Prajwalita Widiati, 2012, Pendelegasian Pengaturan oleh Undang-Undang kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya, *Yuridika*, Volume 27, Nomor 2, Mei-Agustus.

Aditya Rahmadhony, Iwan Setiawan, dan Mario Ekoriano, Problematika, 2020, “Delegated Legislation” pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17, Nomor 4, Desember 407-422.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2019, Rekonstruksi Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Indonesia, *Jurnah Negara Hukum*, Volume 9, Nomor 1.

### Hasil Penelitian/Tugas Akhir:

Mustamin Dg. Matutu, “Selayang Pandang (tentang) Perkembangan Tipe-Tipe Negara Modern”, *Pidato Lustrum/Orasi Ilmiah Penelitian ke IV* (Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 1972).

Nurindria Naharista Vidyapramatya, Magister Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Kedudukan Dewan Sengketa dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia, *Tesis* Tahun 2023.

A.Hamid S. Attamimi, 1990, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, *Disertasi* Fakultas Pascasarja UI, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 307).

### **Internet:**

Mahkamah Agung, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [putusan3.mahkamahagung.go.id.](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/), diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), “Kementerian PUPR Dorong Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi Melalui Dewan Sengketa” <https://pu.go.id/berita/kementerian-pupr-dorong->

[\*penyelesaian-sengketa-kontrak-konstruksi-melalui-dewan-sengketa.\*](#) ,  
diakses pada tanggal 07 Mei 2023.

Hukumonline, 2020, Mengenal Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Muatannya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hierarki-peraturan-perundang-undangan-dan-muatannya-lt5e86a5508d6f1> , diakses pada tanggal pada 07 April 2023.

[Tri Jata Ayu Pramesti](#), 2022, Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012> , diakses pada tanggal 21 April 2023.

Purnomo Sucipto, Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-Undangan? <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-perundang-undangan/> , diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

Dirjen Peraturan Peundang-undangan Kemenkumham, [Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan PerundangUndangan](#), [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=232:prosespengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:prosespengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en) , diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

Siti Yuniarti, Penyelesaian Sengketa Konstruksi Pasca Revisi UU Jasa Konstruksi, <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/28/penyelesaian-sengketa-konstruksi-pasca-revisi-uu-jasa-konstruksi/> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.